

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO 53
TAHUN 1996 TENTANG SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA TERBUKA (STUDI
KASUS SMP TERBUKA PEKANBARU)**

Oleh : Ima Silfia Purba/ 1301110748

(imashelvia@gmail.com)

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

How the government of Indonesia handled the prevail of education, are to build SMP Terbuka in Pekanbaru city. Because one of the problem that faced Pekanbaru city is education and doesn't maximal in implementation of SMP Terbuka. The main problem to complete the implementation of SMP Terbuka is how to ensure children who graduated from elementary school continue into Junior High School through SMP Terbuka for the less fortunate. All of the children will get education if the infrastructure is available. This condition can't be separated from the government of Pekanbaru city to facilitate the infrastructure of education. The research aims to determine implementation of Ministerial Policy of Education and Culture Number 53 Year 1996 About Junior High School Terbuka (Case Study SMP Terbuka Pekanbaru) and examine the factors that influence implementation of Ministerial Policy of Education and Culture Number 53 Year 1996 About Junior High School Terbuka (Case Study SMP Terbuka Pekanbaru).

Theoretical concept used is public policy, education policy and implementation in Van Meter and Van Horn who said that there are 6 variables in implementations such as: 1. Standards and policy goals, 2. resource, 3. Communication between organizations, 4. Characteristics of implementers, 5. political, economic and social condition, 6. Disposition.

Result of the research showed that implementation of Ministerial Policy of Education and Culture Number 53 Year 1996 About Junior High School Terbuka (Case Study SMP Terbuka Pekanbaru) is not optimally yet. Known from bad communication, between the government, school and society. This is caused by limited human resources, infrastructure like the budget is insufficient from Dinas Pendidikan Provinsi Riau to achieve SMP Terbuka and education facility is insufficient, social and economic condition of the society is underprivileged. This resulted that implementation of Ministerial Policy of Education and Culture Number 53 Year 1996 About Junior High School Terbuka is not maximal in Pekanbaru.

Keyword : Implementation, Education and SMP Terbuka

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari sektor pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia, karena manusia hadir tidak mempunyai kesanggupan untuk mengembangkan dirinya sendiri walaupun mempunyai cukup potensi dan kemampuan untuk dikembangkannya. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan demi tercapainya pembangunan manusia seutuhnya yang sehat jasmani, rohani, maupun sosialnya serta tenaga terampil, mandiri dan mampu menghadapi segala tantangan yang ada dalam kehidupan.

Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh laut dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Sumber daya alam dengan segala potensinya memberikan kontribusi yang berarti bagi manusia dan juga memiliki nilai tambah apabila dimanfaatkan menjadi suatu hal yang memiliki nilai jual yang tinggi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah belum meratanya masyarakat mendapatkan pendidikan. Negara kita didirikan justru untuk mencerdaskan putra-putri bangsa, agar dapat hidup layak sebagai manusia bermartabat disamping bangsa-bangsa lain di dunia. Pencerdasan bangsa dilakukan terutama melalui upaya pendidikan. Akan tetapi pendidikan tidak memihak kepada masyarakat dalam tingkat ekonomi rendah. Dalam hal ini sebaiknya masyarakat dengan pemerintah mempunyai komunikasi yang baik sehingga dapat mensosialisasikan bahwa mengenyam pendidikan sangatlah penting bagi seluruh masyarakat walaupun dalam keadaan ekonomi rendah. Peranan pendidikan dasar dikedepankan karena pada pendidikan dasar terletak landasan pijak program mencerdaskan kehidupan bangsa.

SMP Terbuka merupakan sekolah formal yang berinduk pada SMP reguler yang terdekat baik negeri maupun swasta yang memenuhi syarat dengan bentuk pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh. SMP Terbuka menitikberatkan pada belajar secara mandiri dan tetap ada kegiatan tatap muka tetapi terbatas. Konsepnya, proses pembelajaran tidak terikat tempat dan waktu. SMP Terbuka adalah salahsatu subsistem pendidikan jalur sekolah yang menggunakan prinsip belajar secara mandiri, yaitu belajar dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain. Pada SMP Terbuka waktu dan tempat belajar lebih terbuka dan fleksibel disesuaikan dengan kondisi siswa. Wilayah Indonesia yang sangat luas dengan berbagai kondisi geografis yang sulit, kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang masih lemah, dan berbagai faktor lainnya yang berakibat pada terbatasnya layanan pendidikan bagi anak-anak usia 13-15 tahun. Melalui SMP Terbuka ini mereka dapat memperoleh layanan pendidikan yang diperlukan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 1996 pasal 3 SMP Terbuka bertujuan untuk:

1. Memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dasar yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupan yang akan datang sebagai pribadi anggota masyarakat dan warga negara sesuai dengan tingkat perkembangan serta persiapan siswa untuk hidup dalam masyarakat dan mengikuti pendidikan menengah. Pada SMP atau yang setara.
2. Memberikan kesempatan yang karena faktor ekonomi, geografis, sosial, waktu dan lainnya tidak

atau belum dapat mengikuti pendidikan.

Mendirikan program Sekolah Terbuka (SMP Terbuka), dengan berlandaskan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, karena dalam pasal 34 ayat 3 disebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 53 Tahun 1996 bahwa dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesempatan belajar, khususnya bagi tamatan sekolah dasar atau setara yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan disekolah menengah pertama telah dikembangkan sekolah menengah pertama terbuka. Melalui Sekolah Terbuka (SMP Terbuka) dapat diberikan suatu kesempatan yang terbuka untuk melanjutkan sekolah bagi sejumlah besar siswa yang selama ini belum menamatkan pendidikan dasar 9 tahun.

Sebagai pembaharuan pendidikan SMP Terbuka lahir pada saat ledakan lulusan SD Inpres memerlukan penyaluran tempat pendidikan. Disamping itu, karena SMP Terbuka dapat terlaksana di pelosok-pelosok, maka dapat berperan dalam mengatasi masalah pemerataan pendidikan. Karena luwes waktunya, maka pemerataan terhadap mereka yang tidak mampu belajar di SMP reguler/ SMP biasa dapat diatasi.

Sejak dirintisnya Sekolah Terbuka yang dicanangkan pada tahun ajaran 1979/1980 sebagai pembaharuan pendidikan, kebijakan SMP Terbuka sampai sekarang masih dilaksanakan. SMP Terbuka sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagaimana SMP reguler.

Sekolah Menengah Pertama Terbuka merupakan salah satu satuan pendidikan alternatif yang berfungsi untuk menampung tamatan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan setara yang mengalami berbagai kendala kesulitan. Kendala dan kesulitan tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi geografis, daerah terpencil, sosial ekonomi yang lemah, kesulitan transportasi, atau terbatasnya waktu karena harus membantu orang tua bekerja, atau bekerja sendiri mencari nafkah untuk mencukupi keperluan hidupnya, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk belajar di SMP reguler meskipun memungkinkan lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Konsep SMP Terbuka ialah meliputi dasar hukum, pengelolaan, kegiatan pembelajaran, siswa, tenaga pendidik, tempat belajar, waktu belajar, biaya, modul dan sasaran.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 53 Tahun 1996 Tentang Sekolah Lanjutan Pertama Terbuka?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 53 Tahun 1996 Tentang Sekolah Lanjutan Pertama Terbuka?

A. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 53 Tahun 1996 Tentang Sekolah Lanjutan Pertama Terbuka
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan No 53 Tahun 1996 Tentang Sekolah Lanjutan Pertama Terbuka?

Adapun manfaat penelitian secara teoritis ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu administrasi, yakni ilmu Administrasi Negara, khususnya ilmu dibidang kebijakan publik.
2. Sebagai bahan masukan serta informasi bagi peneliti yang ingin membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan dan kajian yang sama dimasa yang akan datang.

Manfaat penelitian secara praktis adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau umumnya dan SMP Terbuka khususnya.
2. Sebagai bahan informasi atau gambaran yang lebih rill, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 53 Tahun 1996 Tentang Sekolah Lanjutan Pertama Terbuka

1.4 Konsep Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut **Ripley dan Franklin dalam Sujianto (2008:33)** menegaskan implementasi yang berhasil tidak hanya ada dua perspektif saja. Pertama keberhasilan diukur melalui tingkat kepatuhan birokrasi level atas. Kedua keberhasilan implementasi dirincikan oleh kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Keberhasilan suatu program dapat dilihat jika program itu berjalan sesuai dengan pola-pola yang telah ditetapkan. Dan menurut **Hassel Nogi**

(2003:13) implemtasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan.

Defenisi lain dari implementasi kebijakan juga dijelaskan oleh **Nugroho (2011-618)** implementasi kebijakan prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan tersebut.

Memahami dan meneliti implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah memahami dan meneliti apa yang senyatanya terjadi setelah suatu kebijakan diformulasi ditetapkan. Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan usaha untuk menimbulkan dampak pada masyarakat seperti yang diungkapkan **Mazmania dan Sabatier dalam Solihin Abdul Wahab (2008:65)** dan mengklarifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel.

Pertama: variabel independen, yaitu mudah atau tidaknya masalah dikendalikan yang berkenan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

Kedua: variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan dipergunakannyateori kasual ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis dan diantaralembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenan dengan

indikator kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga: variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atau hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengaruh pada revisi atau kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan bersifat standar.

Donald Van Metter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008:141) menyatakan bahwa proses ini implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implemetasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Ada enam variabel menurut **Van Metter dan Horn** yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas agak kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implemetasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses

implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kopetensi dan akuntabilitas dari sumber daya-sumber daya nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut. Terlalu merubah perilaku manusia, maka dapa saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan maka seharusnya semakin banyak pula agen yang dilibatkan.

3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan akan sangat kecil untuk terjadinya lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

4. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi nonformal yang akan terlibat mengimplementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya.

5. Kondisi sosial ekonomi

Hal ini perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik, lingkungan sosial ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi, karena itu upaya implementasi mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

6. Disposisi

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan “dari atas” yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

2. Teori Kebijakan Pendidikan

Menurut **Nugroho (2008:140)** kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut diwujudkan atau dicapai melalui lembaga-lembaga sosial atau organisasi-organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, non formal dan informal.

3. **Bascia dalam Amtu (2011:228)** menyatakan pada dasarnya kebijakan pendidikan dipahami sebagai suatu rasionalisasi rencana yang secara sadar diartikulasikan oleh suatu badan otoritas, pemerintah atau instansi pemerintah, yang menyusun naskah atau undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan harapan yang jelas mengenai tindakan eksplisit maupun implisit yang menekankan pada kewenangan formal pemerintah dalam mengambil tindakan.
4. **Anderson dan Tognery dalam Amtu, (2011:228)** mengidentifikasi delapan konsep kebijakan yang berkaitan dengan analisis kebijakan, mulai dari pernyataan tujuan, pedoman untuk bertindak, standar perilaku, strategi untuk memecahkan masalah, serta dampak dari sistem pembuatan kebijakan yang dialami. Kebijakan pendidikan sebagai bagian dari proses perubahan adalah sebuah aturan atau kebijakan atau pedoman yang mencerminkan secara langsung

1.5 METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahanyang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Pada penelitian ini realita dilapangan dijelaskan dengan beberapa fenomena yang ada kaitannya dengan penelitian dengan alasan data dan informasi dijadikan dasar untuk mendeskripsikan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi lokasi penelitian dilakukan

dilingkupi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dengan alasan karena instansi tersebut yang menangani kebijakan Sekolah Terbuka untuk melanjutkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

3. Informan Penelitian

Informan adalah seorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau memberikan keterangan pada peneliti. Informan adalah suatu istilah yang memberikan pengertian kepada subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi kepada peneliti. Dimana teknik pemilihan informan tersebut menggunakan teknik *snowball sampling*.

Selanjutnya informan ditentukan dengan menggunakan metode *snowball sampling* atau bola salju yaitu suatu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Dalam penelitian ini informan pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Riau
2. Kepala Sekolah SMP Terbuka
3. Masyarakat

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan penelitian terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti seperti standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar organisasi,

karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan disposisi. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka diadakan wawancara langsung kepada Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Kepala SMP T, dan Anak Putus Sekolah. Hasil dari tanya jawab yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Sekolah Terbuka Di SMP Terbuka Pekanbaru.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur, dan lampiran data anak putus sekolah yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian diantaranya Dokumen Program (Tentang sekolah menengah pertama terbuka/Permendikbud No. 53 tahun 1996) dan dokumen lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara/*Interview*

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan lisan maupun tanya jawab secara terarah kepada informan penelitian yaitu Kepala Sub Bagian Program, Kepala Bidang

Pendidikan Menengah, Kepala Sekolah Menengah Pertama Terbuka, dan Anak Putus Sekolah. Penelitian mengacu pada pedoman wawancara/interview yang telah dibuat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mengaju sejumlah pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat mendukung keabsahan data.

2. Observasi

Pengumpulan data dengan mengamati berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi lapangan terutama yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mengetahui bagaimana kebijakan SMP Terbuka di SMP Terbuka Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara meneliti laporan-laporan, dokumentasi-dokumentasi, arsip serta berbagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang perolehan data secara komprehensif sesuai dengan fokus penelitian seperti Permendikbud No 53 Tahun 1996 dan peraturan lainnya.

6. Teknik Analisa data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi ditempat penelitian dilaksanakan. kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Untuk meningkatkan tingkat

kepercayaan terhadap penelitian ini. dalam penelitian ini penulis melakukan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Penulis mengambil teknik triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan *check, re-check* dan *crosscheck* antara materi atau data dengan observasi penelitian dilapangan yang selanjutnya hasil observasi ini dilakukan *crosscheck* melalui persepsi peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang implementasi kebijakan Kemendigbud No 53 tahun 1996 tentang Sekolah Lanjutan Pertama Terbuka (Studi Kasus SMP Terbuka Pekanbaru). Berikut dapat digambarkan secara umum proses implementasi didalam kebijakan publik yaitu merupakan rancangan didalam sebuah pelaksanaan kebijakan. Teori Van Matter Van Horn ini menghubungkan implementasi-implementasi yang berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Dengan hasil sesuai variabel-variabel didalam teori adalah sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan sasaran kebijakan yang bersifat

realistis dengan sosio-kultur yang ada dilevel pelaksana kebijakan.

*“Dalam pelaksanaan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan ini tujuannya ialah untuk mereka yang kurang mampu dalam masalah ekonomi, geografis dan waktu, dan yang paling utama untuk mereka yang ekonominya rendah. dan untuk menjalankan kebijakan ini sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional”.***(wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Terbuka, 21 Maret 2017)**

2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya material dan juga sumber daya metoda. Berikut hasil wawancara penulis dengan narasumber :

*“Dana itu diberikan sebesar RP.1000.000 perpeserta didik. Itu diberikan untuk kegiatan belajar mengajar, hal ini sapat dilihat Permendigbud No 8 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. **(wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, 8 Mei 2017)***

3. Komunikaasi antar organisasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan suatu informasi. Ini menyangkut bagaimana kebijakan itu disosialisasikan kepada organisasi atau publik (masyarakat) dan para pelaksana kebijakan dapat mengerti dan memahami tentang pelaksana kebijakan Kemendigbud yang telah ditetapkan tercapai.

“Kalau masalah sosialisasi sosialisasi program SMP Terbuka ini kami melakukannya jika ada rapat dengan wali murid maka kami komunikasikan dan mengenalkan tentang SMP Terbuka. Seperti itulah kami mengenalkan SMP Terbuka kepada masyarakat. Akan tetapi pada saat dilakukan rapat dengan wali murid masih banyak yang tidak menghadirinya. Dan kami juga tidak pernah mengenalkan SMP Terbuka melalui media elektronik seperti radio, televisi dan juga tidak pernah melakukan sosialisasi melalui media cetak seperti booklet dan leaflet, koran, dan spanduk”. **(wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Terbuka, 4 April 2017)**

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Berikut hasil wawancara penulis dengan narasumber:

“Untuk mencapai keberhasilan program SMP Terbuka kami pihak pemerintah telah menyusun berbagai strategi ataupun kegiatan yang secara langsung menjai sub program bahkan menjadi indikator pencapaian program tersebut. dalam menyusun kegiatan, dilakukan dengan menetapkan skala prioritas kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian program SMP Terbuka”. **(wawancara dengan kepala bidang pembinaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, 8 mei 2017)**

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan politik

Pada saat suatu kebijakan diimplementasikan maka tidak terlepas dari pengaruh sosial, ekonomi dan politik.

“Keadaan ekonomi keluarga di daerah ini cukup beragam, ada masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhannya, ada juga masyarakat yang penghasilannya pas-pasan bahkan tidak cukup. Kebanyakan anak yang putus sekolah dikarenakan oleh faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, anak-anak disekolah SMP Terbuka ini juga banyak yang bekerja membantu orangtua bekerja”. (wawancara dengan wakil kepala sekolah SMP Terbuka, 21 maret 2017)

6. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kondisi yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, intensitas disposisi implementor yaitu preferensi yang dimiliki.

“Kami sebagai pelaksana sekaligus guru sangat senang dan mendukung program SMP Terbuka, karena program ini akan membuat pekanbaru mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, dan jika akan sangat membantu mereka yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan sekolah sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah”. (wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Terbuka, 21 maret 2017)

Faktor-faktor yang menghambat

1. Dana

Dana merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan kebijakan apabila suatu

kebijakan dirancang dengan baik namun dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan, maka akan sulit untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut dengan maksimal. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pemerataan pelayanan pendidikan menengah dan memberikan kesempatan dan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh disekolah dasar yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupan yang akan datang sebagai pribadi anggota masyarakat dan warga Negara sesuai dengan tingkat perkembangan serta persiapan siswa untuk hidup dalam masyarakat dan mengikuti pendidikan menengah pada SMP atau yang setara.

Program SMP Terbuka ini membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang bersifat menyeluruh bagi seluruh siswa, untuk itu diperlukan dana. Namun dalam implementasi program SMP Terbuka ini dana yang dimiliki pemerintah belum mencukupi.

2. Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud dalam hal ini ialah merupakan sarana pendidikan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses belajar mengajar, seperti halnya bangunan, ruang kelas dan lain sebagainya merupakan alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Fasilitas juga mendukung dalam pengimplementasian kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk melaksanakan pemerataan pendidikan diperlukannya fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam buku panduan pelaksanaan penyelenggaraan SMP Terbuka seperti tersedianya ruang sanggar, ruang praktik, ruang bimbingan dan konseling, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang serbaguna. Namun kenyataannya pada SMP Terbuka

pekanbaru belum menyediakan fasilitas seperti ruang sanggar, ruang praktik, dan ruang bimbingan dan konseling

3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan suatu informasi. Ini menyangkut bagaimana kebijakan itu disosialisasikan kepada organisasi atau publik (masyarakat) dan para pelaksana kebijakan dapat mengerti dan memahami tentang pelaksana Kebijakan Kemendigbud yang telah ditetapkan tercapai.

4. Kondisi sosial, dan ekonomi masyarakat
kondisi sosial dan perekonomian masyarakat yang rendah akan sangat mempengaruhi pendidikan. Hal ini disebabkan jika kondisi sosial orangtua yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik atau tinggi maka akan jauh lebih memahami akan pentingnya pendidikan begitupula sebaliknya apabila orangtua memiliki latar belakang pendidikan yang rendah maka akan sulit mengerti akan pentingnya pendidikan

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Dalam pelaksanaan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 53 Tahun 1996 Tentang Sekolah Lanjutan Pertama Terbuka yang menurut Van Matter Van Horn proses implementasi dipengaruhi oleh 6 variabel didalamnya belum optimal. Hal ini dikarenakan ada 3 variabel yang belum berjalan dengan baik yaitu sumber daya (dana , fasilitas), komunikasi antar organisasi (sosialisasi), dan kondisi sosial, serta kondisi ekonomi masyarakat setempat. 3 variabel seperti standar dan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana, dan disposisi sudah berjalan dengan baik.

C. Faktor yang menjadi penghambat SMP Terbuka adalah kurangnya sumber dana, sumber fasilitas dan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang masih lemah untuk mengikuti program SMP Terbuka. Dana dan fasilitas merupakan hal yang sangat penting untuk melangsungkan proses belajar mengajar, kurangnya sosialisasi antar pihak pelaksana dengan masyarakat dan publik, sehingga masyarakat kurang memahami tujuan dari didirikannya SMP Terbuka di Kota Pekanbaru ini.

A. SARAN

1. Dari kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:
 - a. Sebaiknya Dinas Pendidikan Provinsi Riau melakukan komunikasi ke Gubernur atau Menteri Pendidikan tentang anggaran yang minim. Sehingga kebijakan dapat terlaksana apabila anggaran tercukupi.
 - b. Melakukan sosialisasi langsung ke target group yaitu masyarakat, dan juga memberikan *booklet* ataupun *leaflet* sehingga masyarakat mengetahui bahwa SMP Terbuka gratis dan SMP Terbuka ini ditujukan bagi mereka yang kurang mampu.
 - c. Fasilitas yang ada di SMP Terbuka sebaiknya dilakukan penambahan, seperti disediakan ruang sanggar, ruang praktik, ruang bimbingan dan ruang konseling agar dapat mengembangkan potensi diri siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Daftar Pustaka*
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- _____. 2006. *dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Amtu, Onisimus, 2011. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, strategi dan implementasi*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Gramedia, jakarta
- _____. 2011. *Implementasi Kebijakan*. Gramedia, jakarta
- _____. 2003. *kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta
- _____. 2008. *kebijakan Pendidikan. Pustaka Belajar*. Yogyakarta
- Purwanto, Agus Erwan dan Sulistyastuti, Ratih Diah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta
- _____. 2002. *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Suharto. Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- _____. 2008. *kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Alaf Riau Pekanbaru

_____. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik)*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Syaukani. 2002. *Implementasi Kebijakan Publik*. Alaf Riau. Pekanbaru.

Tangkilisan, Hassan Nogi. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan -Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Persindo. Yogyakarta

Dokumen

- Kemendigbud No 53 Tahun 1996 Tentang Sekolah Lanjutan Pertama Terbuka.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
- Intruksi Presiden No 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Percepatan Penuntasan Wajib Belajar

Karya Ilmiah

Aspri Anti, 2015. *Implementasi Program Wajin Belajar 9 Tahun Di Pekanbaru Tahun 2012*. Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru.

Internet

Pengembangan Kelembagaan Sebagai Upaya Peningkatan Akses dan Mutu SMP Terbuka. 2004

<http://www.seameo.org/v/library/dlwelcome/publication/paper/openjunior.htm>

Dikutip pada tanggal 16 Januari 2017 jam 20:15